



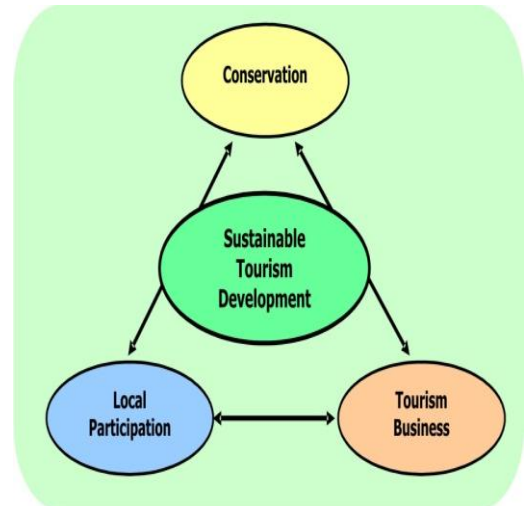
# ***Policy Brief***

## ***Engendering Kebijakan Pariwisata Berkelanjutan***

***Oktober 2016***

Pada dasarnya pembangunan pariwisata berwawasan lingkungan hidup adalah pembangunan pariwisata yang mendasarkan pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Dalam mensukseskan prinsip pembangunan pariwisata yang berkelanjutan, perlu mengedepankan 3 (tiga) isu utama, yakni konservasi (*conservation*), partisipasi masyarakat setempat (*local participation*), dan usaha pariwisata (*tourism business*). Namun, hasil studi menemukan bahwa pembangunan pariwisata seringkali hanya memberikan manfaat ekonomi dengan mengabaikan kelestarian lingkungan dan nilai-nilai sosial budaya setempat. Oleh karena itu, partisipasi aktif masyarakat, baik perempuan maupun laki-laki untuk mengembangkan pariwisata berkelanjutan sangatlah diperlukan. Untuk menjamin partisipasi aktif perempuan dan laki-laki dalam pengembangan pariwisata diperlukan kebijakan-kebijakan yang responsif gender. Sayangnya, fakta menunjukkan bahwa kebijakan-kebijakan berkaitan dengan pengembangan pariwisata di daerah masih bersifat netral gender dan peran serta perempuan dalam pembangunan pariwisata belum optimal dan masih terpinggirkan, baik karena jenis kelaminnya maupun konstruksi sosial budayanya. Selain itu, belum ada sinkronisasi dan operasionalisasi antara kebijakan makro daerah (RPJMD) terkait gender dengan renstra maupun renja SKPD. Karena itu, *engendering* (menggenderkan) kebijakan pembangunan pariwisata berkelanjutan menjadi penting.

**Gambar 1: Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan.**



Sumber: Diadaptasikan dari Clements (2007).

## **Policy Brief**

Oktober 2016

### **Penulis:**

Ismi Dwi Astuti Nurhaeni  
Rara Sugiarti  
Rino A. Nugroho

### **Desain:**

Martiyas A. Pamungkas

### **Alamat:**

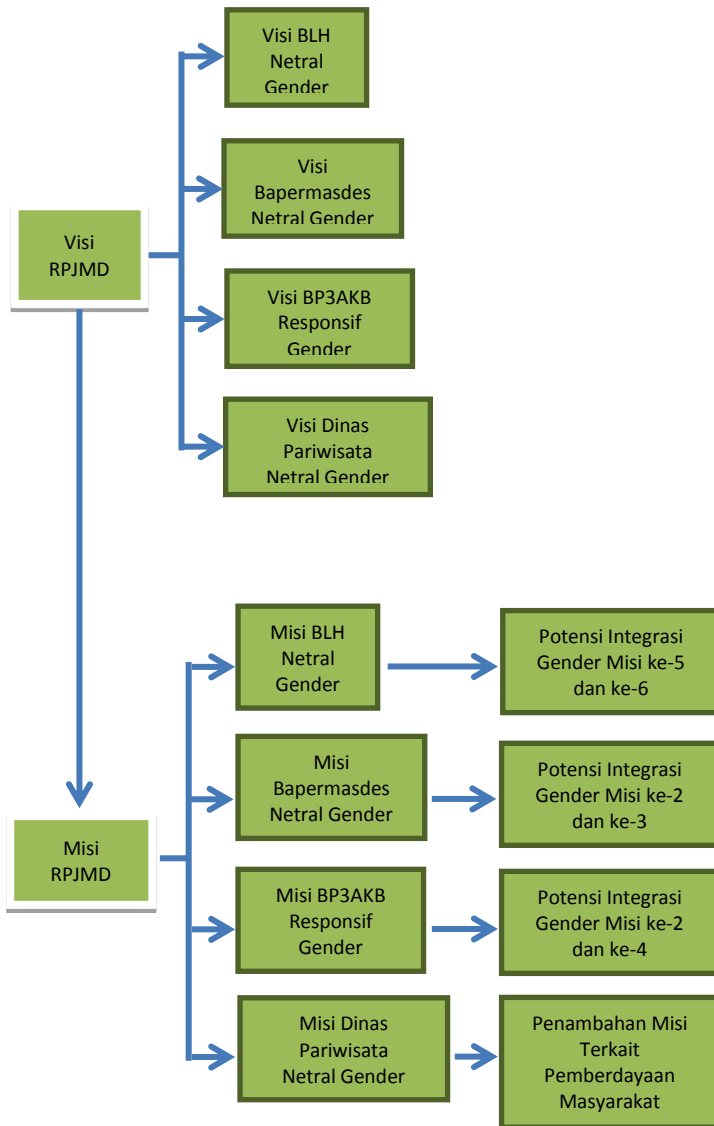
P3G LPPM/ FISIP  
Universitas Sebelas Maret  
Surakarta  
Jl. Ir. Sutami No. 36A  
Kentingan, Surakarta  
Phone (+62271) 637358  
e-mail:  
ismidwiastuti@staff.uns.ac.id  
website: www.fisip.uns.ac.id

### **Mengapa pembangunan pariwisata harus berkelanjutan dan pro gender?**

Pariwisata merupakan salah satu industri yang dijadikan andalan untuk meraih devisa, membuka peluang usaha, dan menciptakan lapangan kerja. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menyebutkan bahwa kepariwisataan bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan rakyat, melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya serta memajukan kebudayaan. Dengan demikian, pembangunan pariwisata memiliki potensi dalam menyumbang perekonomian suatu daerah dan mendukung perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup. Namun, di sisi lain, pembangunan pariwisata seringkali justru mendukung terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan adanya perencanaan pengembangan pariwisata dengan melibatkan peran masyarakat (*civil society*), baik laki-laki maupun perempuan, sehingga pembangunan pariwisata tidak cenderung merusak tetapi justru mendukung kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Perempuan merupakan aktor yang memiliki peran penting di dalam pembangunan pariwisata baik sebagai pengambil kebijakan, pengelola, penyedia jasa secara langsung, maupun sebagai "tuan rumah" di daerah tujuan wisata. Permasalahannya, peran serta perempuan dalam pembangunan pariwisata seringkali diabaikan, baik karena jenis kelaminnya, konstruksi sosial budayanya maupun kebijakannya yang belum memperhitungkan keberadaan perempuan. Akibatnya kompetensi dan kapasitas perempuan dalam pengembangan pariwisata belum mampu memenuhi prinsip-prinsip pengembangan dan pengelolaan yang berwawasan lingkungan hidup. Padahal, berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 67 Tahun 2011, pemerintah daerah harus mengembangkan kebijakan dalam berbagai bidang pembangunan yang responsif gender. Sayangnya, integrasi gender dalam kebijakan pembangunan tidak mudah karena faktor yang melingkupinya, baik faktor internal maupun eksternal. Oleh karena itu, perlu dilakukan *engendering* (integrasi gender) dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan.

**Gambar 2:** Konsistensi, Sinkronisasi dan Operasionalisasi Visi dan Misi Daerah dan SKPD



## Situasi Pembangunan Pariwisata Saat Ini

Hasil penelitian Nurhaeni, dkk (2015) menemukan isu-isu strategis pemberdayaan perempuan dalam pengembangan pariwisata berwawasan lingkungan hidup di kawasan Gunung Lawu mencakup:

- 1) Belum ada sinkronisasi dan operasionalisasi antara kebijakan makro daerah terkait gender pada RPJMD dengan kebijakan renstra dan renja SKPD yang menangani pembangunan pariwisata ramah lingkungan (lihat gambar 2);
- 2) Belum ada sensitivitas gender di kalangan stakeholder sehingga jaminan *sistem judicial* dan hukum yang memberikan perlindungan terhadap status perempuan dan laki-laki pada program pembangunan pariwisata ramah lingkungan tidak terimplementasi secara optimal;
- 3) Lemahnya peran kelembagaan struktural dan fungsional PUG mengakibatkan strategi percepatan pengarusutamaan gender melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender dalam pembangunan pariwisata belum terimplementasi;
- 4) Representasi perempuan pada kelembagaan yang berperan strategis dalam pengembangan pariwisata ramah lingkungan, yaitu Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), tidak ada;
- 5) Belum ada tindakan *affirmative action* untuk memberikan layanan pembangunan pariwisata yang responsif terhadap perbedaan kebutuhan perempuan dan laki-laki (Nurhaeni, 2015a)

## Referensi

Clements, S., 2007, *A Resource guide for Sustainable Tourism, Down East Resource Conservation and Development*. Council: Sea Grant Publication.

Nurhaeni, Ismi Dwi Astuti, dkk. 2005. *Reformasi Kebijakan Pemberdayaan Perempuan dalam Pengembangan Pariwisata Berwawasan Lingkungan Hidup di Kawasan Gununglawu*. Universitas Sebelas Maret: 2015. (un published)

Nurhaeni, Ismi Dwi Astuti, dkk. 2005. *Engendering Development: Case Study on Eco-Tourism (Menggenderkan Pembangunan: Studi Kasus pada Pembangunan Pariwisata Ramah Lingkungan)*. Dimuat dalam *Proceeding Seminar Nasional Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (SNISIP) FISIP UNS*. 2015. Tema: Gender Politik dan Pembangunan di Indonesia: Perspektif Multidisiplin. Surakarta: UNS Press. ISBN. 978-979-498-972-2.

## Rekomendasi Kebijakan

- 1) Perlu adanya sinkronisasi dan operasionalisasi antara kebijakan makro daerah terkait gender pada RPJMD dengan kebijakan renstra dan renja SKPD yang menangani pembangunan pariwisata ramah lingkungan;
- 2) Perlu adanya sensitivitas gender di kalangan stakeholder sehingga jaminan *sistem judicial* dan hukum yang memberikan perlindungan terhadap status perempuan dan laki-laki pada program pembangunan pariwisata ramah lingkungan tidak terimplementasi secara optimal;
- 3) Memperkuat peran kelembagaan struktural dan fungsional PUG dalam mengimplementasikan strategi percepatan pengarusutamaan gender melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender dalam pembangunan pariwisata;
- 4) Meningkatkan kuantitas representasi perempuan pada kelembagaan yang berperan strategis dalam pengembangan pariwisata ramah lingkungan, yaitu Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH); dan
- 5) Perlu diadakan tindakan *affirmative action* untuk memberikan layanan pembangunan pariwisata yang responsif terhadap perbedaan kebutuhan perempuan dan laki-laki (Nurhaeni, 2015a)